

PERUBAHAN ORIENTASI BUDI UTOMO DARI SOSIAL EKONOMI KE POLITIK

Moh. Yulian Al Adha

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

E-mail: hermawan.yulian@yahoo.com

Sumarno

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

ABSTRAK

Budi Utomo sebagai organisasi yang berorientasi sosial-ekonomi, melakukan perubahan orientasi ke ranah politik pada tahun 1915. Penelitian ini difokuskan untuk mencari motif dari perubahan orientasi yang dilakukan Budi Utomo. Rumusan masalah tentang penyebab terjadinya perubahan orientasi Budi Utomo dari sosial ekonomi ke politik, bagaimana proses perubahan orientasi Budi Utomo dari sosial ekonomi ke politik, dan bagaimana bentuk perubahan orientasi Budi Utomo dari sosial ekonomi ke politik. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan tahapan *heuristik* (mengumpulkan data), *kritik*, (melakukan uji validitas sumber yang telah didapat dalam proses heuristik), *interpretasi* (penafsiran terhadap sumber yang diperoleh), *historiografi*, (menyajikan hasil penelitian dalam suatu bentuk tulisan). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Munculnya Organisasi baru yang lebih revolusioner seperti Sarekat Islam dan Indische partij membuat kedudukan Budi Utomo terdesak. Perubahan orientasi Budi Utomo berawal saat Radjiman ditunjuk sebagai ketua Budi Utomo. Saat pecahnya Perang Dunia 1 Radjiman mempropagandakan wajib militer bagi penduduk pribumi dan diadakanya suatu Dewan Rakyat. Wajib milisi merupakan tindakan pertama Budi Utomo di ranah politik. Budi Utomo terlibat dalam berbagai kegiatan politik diantaranya, Budi Utomo terlibat dalam upaya pembentukan milisi dan *Volksraad* (dewan rakyat). Budi Utomo bergabung dalam *Radicale Concentratie*. Budi Utomo terlibat dalam *Inlandische Meerderheia* (agar golongan terbesar dalam *Volksraad* terdiri dari golongan pribumi).

Kata kunci : Perubahan Orientasi, Budi Utomo, Politik

ABSTRACT

Budi Utomo as the organization of social-economic oriented, make changes to the orientation of the political arena in 1915. This research focuses on finding patterns of change in orientation is done Budi Utomo. Formulation of the problem about the causes of changes in the orientation of Budi Utomo from political to socio-economic, how the process of change in the orientation of Budi Utomo sociol-economic to the political, and how to change the orientation of Budi Utomo form of social-economic to the political. The research method used in this study with a history of stage heuristic (collecting data), critique, (to test the validity of the source that has been obtained in a heuristic), interpretation (interpretation of the source obtained), historiography, (present research results in a form of writing) . Results of this study concluded that the emergence of new more revolutionary organizations as the Sarekat Islam and Indische Partij make the position Budi Utomo pressed. Budi Utomo orientation change began when Radjiman appointed as chairman of the Budi Utomo. When the outbreak of World War 1 Radjiman propagate conscription for the indigenous population and appear a People's Council. Compulsory militia Budi Utomo was the first action in the political sphere. Budi Utomo involved in various political activities including, Budi Utomo involved in efforts to form militias and Volksraad (people's council). Budi Utomo join concentratie Radicale. Budi Utomo involved in Inlandische Meerderheia (so that the largest group in the Volksraad consisted of the indigenous groups).

Keywords: Orientation Change, Budi Utomo, Politic

PENDAHULUAN

Budi Utomo yang lahir sebagai organisasi sosial merubah orientasinya ke ranah politik pada tahun 1915, padahal ada Regering Reglement pasal 111 yang melarang diadakannya rapat dan perkumpulan politik. Hal inilah yang menjadi menarik untuk dilakukan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu penyebab Budi Utomo melakukan perubahan orientasi, serta mencari tahu cara Budi Utomo lepas dari Regering Reglement 111. Penelitian ini juga bertujuan untuk mencari tahu proses perubahan orientasi yang dilakukan Budi Utomo, serta dampak yang ditimbulkan dari perubahan orientasi tersebut.

Budi Utomo lahir pada 20 Mei 1908. Tujuan Budi Utomo tercantum dalam pasal 2 anggaran dasar “ *de harmonische ontwikkeling van landen volk van java en Madura*” artinya: kemajuan yang harmonis untuk nusa bangsa Jawa dan Madura.¹ Untuk mewujudkan tujuannya, Budi Utomo menggunakan jalan pendidikan dan kegiatan sosial-ekonomi. Usaha pendidikan dan kegiatan sosial yang dilakukan Budi Utomo ternyata kurang mendapat simpati dari rakyat, karena sifatnya yang hanya terbatas pada kaum priyayi Jawa dan Madura saja. Munculnya organisasi lain seperti Sarekat Islam dan Indische Partij membuat kedudukan Budi Utomo terdesak.

Dukungan penduduk pribumi diambil alih oleh Sarekat Islam dan Indische Partij. Budi Utomo seolah-olah mati dari segi politik.² Tirtokusumo meletakkan jabatannya sebagai presiden Budi Utomo pada tahun 1912 karena merasa tidak mampu memperbaiki keadaan Budi Utomo.³ Pangeran Ario Noto Dirodjo dipilih sebagai penggantinya. Kebijakan yang dilakukan Pangeran Ario Noto Dirodjo dengan mendirikan *Neutral Onderwijs* (Sekolah Netral) dan dana pendidikan darmo woro ternyata belum mampu mengangkat citra Budi Utomo. Pengeran Ario Noto Dirodjo meletakkan jabatannya pada akhir tahun 1914 karena sakit. Raden Ngabehi Wediopuro atau Radjiman ditunjuk sebagai presiden Budi Utomo.⁴ Hasil pekerjaan Budi Utomo yang paling penting dibawah Radjiman adalah propaganda

melaksanakan wajib militer bagi penduduk pribumi.⁵

Budi Utomo mengutus dua utusannya untuk mempropagandakan wajib militer sekaligus mencari tahu tanggapan penduduk pribumi tentang gagasan tersebut. Hasil dari perjalanan propaganda tersebut diputuskan bahwa Budi Utomo melakukan Rapat Umum di Bandung pada tanggal 5 dan 6 Agustus 1915. Hasil dari Rapat Umum di Bandung dicapailah suatu mosi, melakukan wajib militer adalah sesuatu yang baik, akan tetapi diberi keterangan, harus diadakan terlebih dahulu suatu Dewan Rakyat.⁶ Tuntutan agar segera dibentuknya dewan rakyat semakin sering terdengar. Suasana dalam pemerintah kolonial juga mendukung tuntutan tersebut. Gubernur Jendral yang baru van Limburg Stirum sepertinya membuka pintu lebar-lebar untuk mewujudkan gagasan pembentukan dewan perwakilan rakyat tersebut.⁷

Perubahan orientasi ini mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap Budi Utomo. Budi Utomo mampu memperoleh dukungan rakyat yang sempat diambil alih oleh Sarekat Islam dan Indische Partij.⁸ Kiprah Budi Utomo yang memperjuangkan terbentuknya sebuah Dewan Rakyat (Volksraad) mendapat tanggapan positif dari penduduk pribumi. Perubahan orientasi ini memberikan beberapa keuntungan bagi Budi Utomo diantaranya, Budi Utomo mampu meperoleh dukungan rakyat, selain itu Budi Utomo mampu masuk kedalam sistem birokrasi pemerintah kolonial dengan memperjuangan terbentuknya sebuah Dewan Rakyat (Volksraad).

Perubahan orientasi ini menjadi menarik karena masih belum ada penelitian secara khusus yang membahas tentang perubahan orientasi Budi Utomo dari sosial ekonomi ke politik, penelitian yang sudah ada seperti tesis Akira Nagasumi yang berjudul *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia, Budi Utomo 1908-1918* dan beberapa penelitian lainnya hanya membahas Budi Utomo secara umum saja. Sehingga ini adalah kesempatan bagi penulis untuk mengungkapkan perubahan orientasi Budi Utomo sebaik mungkin.

¹Statuten Boedi Oetomo tanggal 20 Mei 1908, dalam karya: Darsjaf Rachman. *kilasan petikan sejarah Budi Utomo*. (Jakarta : Penerbit Yayasan Idayu 1975)hlm. 107

²Pitut Soeharto dan Zainul Ikhsan. *Op. Cit.*, hlm. 132

³ Marwati Djoened dkk. *Sejarah Nasional Indonesia jilid V* (Jakarta : Penerbit Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1975) hlm. 182

⁴ Pitut Soeharto dan Zainul Ikhsan. *Op. Cit.*,hlm. 134

⁵ *Ibid.*,

⁶ *Boedi Oetomo, Officieel organ dari perkoempoelan boedi Oetomo, Congres Nummer April-Juni 1926* dalam karya: Pitut Soeharto dan Zainul Ikhsan. *Cahaya di Kegelapan : Capita Selecta Kedua Boedi Oetomo dan Sarekat Islam* (Jakarta : Penerbit Jayasakti 1981)hlm. 125

⁷ Gamal Komandoko. *Boedi Oetomo : Awal Bangkitnya Kesadaran Bangsa*(Yogyakarta : Penerbit Medpress 2008) hlm. 114

⁸ Pitut Soeharto dan Zainul Ikhsan. *Op. Cit.*,hlm. 161

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian sejarah diperlukan adanya langkah-langkah kerja. Seperti halnya ilmu-ilmu yang lain, Sejarah juga dituntut memiliki seperangkat aturan dan prosedur kerja yang lebih dikenal dengan metode sejarah. Dalam sistem keilmuan, metode sejarah merupakan seperangkat prosedur, alat, atau piranti yang digunakan sejarawan dalam tugas meneliti dan menyusun sejarah Terdapat empat langkah yang digunakan dalam kegiatan metode penulisan sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan Historiografi.⁹

Kegiatan pertama yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah heuristik, yaitu menelusuri sumber-sumber sejarah yang berhubungan dengan obyek penelitian. Pada tahap yang telah dilakukan oleh peneliti adalah pengumpulan data berupa sumber primer dan sumber sekunder (sumber pustaka) yang berhubungan dengan perubahan orientasi Budi Utomo dari sosial ekonomi ke politik. Adapun sumber primer yang berhasil peneliti dapatkan dapat di lihat di bagian Daftar Pustaka. Untuk mendapatkan sumber-sumber tersebut penulis melakukan pencarian di beberapa perpustakaan seperti Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Perpustakaan Daerah (PERPUSDA), Perpustakaan UNESA serta Perpustakaan Wiung. Selain arsip atau sumber primer (Arsip) di atas penulis juga mencari referensi atau sumber skunder berupa buku-buku yang membahas tentang perubahan orientasi Budi Utomo dari soial ekonomi ke politik Seperti buku : *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia, Budi Utomo 1908-1918*. Karya Nagazumi Akira , *Boedi Oetomo, Awal Bangkitnya Kesadaran Bangsa*. karya Gamal Komandoko dan *Sejarah Nasional Indonesia v* Karya Marwati Djoened Poesponegoro.

Tahap kedua merupakan tahap kritik terhadap sumber. Penulis melakukan verifikasi untuk menguji validitas sumber-sumber yang telah diperoleh Dari beberapa sumber yang telah di dapatkan,peneliti melakukan kritik dengan mengidentifikasi sumber-sumber tersebut, pada tahap kritik ini peneliti mengidentifikasi sumber-sumber tersebut dengan cara perbandingan dengan berbagai sumber yang di pakai sehingga dengan adanya kritik diharapkan antara karya satu dengan karya yang lainnya dapat saling melengkapi.

Tahap ketiga adalah interpretasi, yaitu penulis melakukan penafsiran terhadap sumber-sumber tersebut dimana sumber-sumber yang berhasil diperoleh dikonfrontasikan satu sama lain sehingga dapat terjadi rekonstruksi fakta sejarah. Pada tahap interpretasi ini selanjutnya semua sumber yang telah teruji kredibilitas dan otentitasnya serta memenuhi unsur-unsur prioritas yang di harapkan

⁹ Aminudin Kasdi,2001,*Memahami Sejarah*,Surabaya : UNESA University Press,hal.12

kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis sumber. Dari analisis sumber inilah didapatkan informasi dan fakta dalam sumber maupun data yang ada. Pada tahap akhir,penulis melakukan historiografi yaitu penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil sejarah yang telah dilakukan yaitu pemaparan dalam bentuk Jurnal

HASIL PENELITIAN

Kejadian yang berlangsung di benua Eropa, juga menjadi pertimbangan Budi Utomo untuk terjun ke ranah politik. Peristiwa pembunuhan terhadap pemimpin Austria, Franz Ferdinand dan isterinya pada tanggal 28 Juni 1914 oleh kelompok teroris Serbia, Gavrilo Princip di Sarajevo menyebabkan pecahnya Perang Dunia 1. Pada Perang Dunia 1 Etente Tiga yang terdiri dari Inggris, Prancis dan Rusia berperang melawan kekuatan poros yang beranggotakan Jerman, Austria Hongaria dan Turki. Perang semakin sengit setelah Amerika Serikat bergabung dengan Etente tiga.¹⁰

Pecahnya Perang Dunia 1 pada tahun 1914 menjadi momentum kebangkitan Budi Utomo. Issue tentang pentingnya milisi diangkat sebagai langkah awal pergerakan politik Budi Utomo. Berdasarkan kekhawatiran akan munculnya intervensi kekuasaan asing lain, Budi Utomo melancarkan issue pentingnya pertahanan sendiri dan menjadi organisasi pertama yang menyokong gagasan wajib militer bagi penduduk pribumi¹¹

Pemerintah kolonial sangat mengutamakan pertahanan laut di Hindia Belanda sebelum pecahnya Perang Dunia 1. Kekuatan pasukan darat seperti diabaikan, kemudian pemerintah mulai menyadari jika terjadi serangan militer ke Hindia Belanda tidak akan cukup hanya mengandalkan pertahanan laut. Gagasan dibentuknya milisi pribumi sebagai pasukan non reguler, untuk mengatasi kemungkinan datangnya serangan militer pun mengemuka. Gagasan itu disebut *Indie Weerbaar* atau kesanggupan Hindia membela diri. Pertahanan bagi Hindia Belanda dipandang sangat penting untuk mengantisipasi kemungkinan serangan Jepang. Kekhawatiran seperti itu memang beralasan mengingat Jepang telah menunjukkan perilaku ekspansinya ke berbagai negara tetangganya. Mereka telah melakukan ekspansi ke Rusia dan juga Korea. Bukan sesuatu yang

¹⁰ Gamal Komandoko. *Boedi Oetomo : Awal Bangkitnya Kesadaran Bangsa*(Yogyakarta : Penerbit Medpress 2008) hlm.105

¹¹ Marwati Djoened dkk. *Sejarah Nasional Indonesia jilid V* (Jakarta : Penerbit Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1975) hlm.182

mustahil jika Jepang akhirnya menyerang Hindia Belanda.¹²

Gubernur Jendral dari Idenburg ke J.P. Graff van Linburg Stirum juga menjadi salah satu sebab terjadinya perubahan orientasi Budi Utomo. J.P. Graff van Linburg Stirum dikenal bukan ahli urusan Hindia. Van Linburg Stirum juga dikenal sebagai diplomat yang berhaluan liberal. Pengangkatannya di Hindia semakin mendorong semangat Budi Utomo untuk terjun ke ranah politik.¹³ Van Linburg Stirum sejalan dengan Budi Utomo yang menginginkan pembaharuan di Hindia, dilakukan secara bertahap. Van Linburg Stirum memberikan kemudahan bagi Budi Utomo untuk memasuki ranah politik, meski pada saat itu masih ada Regering Reglement pasal 111 yang melarang diadakannya rapat dan perkumpulan politik.

Tahun 1914 Pangeran Ario Noto Dirodjo meletakkan jabatannya sebagai ketua umum Budi Utomo karena gangguan kesehatan dan sebagai penggantinya ditunjuk Raden Ngabehi Wediodipuro atau yang lebih dikenal sebagai Radjiman. Raden Ngabehi Wediopoero atau Radjiman adalah seorang dokter lulusan STOVIA yang menganjurkan keseimbangan antara kebudayaan timur dan barat. Radjiman berpendapat orang Jawa harus berbekal ilmu pengetahuan barat secara cukup, namun tetap harus bersikap sebagai orang Jawa, agar tidak kehilangan kebudayaannya.¹⁴ Radjiman juga sering memperingatkan kemungkinan yang timbul dari pemujaan yang berlebihan terhadap budaya barat, akan mengakibatkan terjadinya disintegrasi kebudayaan Jawa.¹⁵

Hasil pekerjaan Budi Utomo yang paling penting dibawah pimpinan Radjiman adalah propaganda untuk melaksanakan wajib militer bagi penduduk pribumi.¹⁶ Dengan membicarakan hal milisi Budi Utomo sudah masuk dalam politik. Walaupun politik program waktu itu belum ada.¹⁷ Radjiman mulai membahas masalah pertahanan ini selama satu bulan sesudah perang pecah. Langkah

pertama yang diambil oleh Radjiman, menyerukan diadakannya rapat seluruh Jawa di Semarang pada tanggal 13 September 1914. Masalah yang dibahas ialah bagaimana sikap penduduk pribumi yang tepat terhadap pemerintah pada saat genting, yang ditimbulkan oleh pecahnya Perang besar di Eropa.¹⁸

Pada rapat tersebut Budi Utomo mengusulkan agar bangsa Jawa memihak pada pemerintah dalam berperang melawan penyerbu yang mungkin akan datang. Perumusan tegas seperti itu tidak diterima, tetapi para utusan mengesahkan dua butir sebagai berikut:

- (A) Apabila ancaman peperangan timbul di Jawa, Rakyat tidak akan bisa terlepas sedikitpun dari tanah air mereka
- (B) Di tengah-tengah pembicaraan pada rapat nasional tersebut diatas, dikemukakan pendapat bahwa jika ancaman peperangan terjadi, apabila mungkin rakyat pribumi harus membantu mempertahankan keamanan tanah air, sehingga tidak akan ada beban tambahan bagi pemerintah¹⁹

Seorang kapten tentara Belanda bernama Dinger memberi ceramah di Batavia mengenai perlunya angkatan milisi untuk pertahanan Hindia pada awal tahun 1915, gagasan ini mendapat tanggapan yang tegas. Dwidjosewojo melukiskan tanggapan pemimpin Budi Utomo terhadap ceramah Dinger sebagai berikut: Setelah mendengarkan ceramah dinger itu, pengurus Pusat Budi Utomo mengadakan rapatnya untuk mengambil keputusan, apakah Budi Utomo setuju atau tidak setuju terhadap sistem itu. Sesudah dipertimbangkan masak-masak diputuskan bahwa sistem milisi harus dipandang sangat penting dari sudut pandangan ilmu pendidikan rakyat.²⁰

Pusat dengan mantap mengesahkan gagasan sistem milisi dengan dan mengirim dua anggotanya yang terkemuka, yaitu komisar Dwidjosewojo dan Sastrowidjono melakukan perjalanan diseluruh Jawa untuk berkampanye mendukung rencana tersebut. Dwidjosewojo dan Sastrowidjono diminta untuk memberikan laporan kepada pengurus besar tentang reaksi rakyat. Hasil propaganda adalah timbulnya mosi milisi yang disusun oleh rapat umum Budi Utomo, Agustus 1915 yang berbunyi : “ Rapat Budi Utomo di Bandung pada tanggal 5 dan 6 Agustus 1915 menimbang bahwa kepentingan kemajuan daerah- daerah ini selanjutnya ketentraman tidak boleh diganggu sesaatpun, menimbang bahwa untuk menjamin ketentraman tersebut rakyat wajib memberikan sumbangan. Mengingat tentara tetap akan lebih

¹² Akira Nagazumi. *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia : Budi Utomo 1908-1918*. (Jakarta : Pustaka Umum, 1989) hlm. 164

¹³ Akira Nagazumi. *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia : Budi Utomo 1908-1918*. (Jakarta : Pustaka Umum, 1989) hlm. 182

¹⁴ Gamal Komandoko. *Boedi Oetomo : Awal Bangkitnya Kesadaran Bangsa (Yogyakarta : Penerbit Medpress 2008)* hlm. 62

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Soembangsih, *Goedenboek Boedi Oetomo, 1908-20-Mei-1918, Tidschrift Nederl. Indie Oud n Nieuw*, dalam karya: Pitut Soeharto-Zainoel Ihsan. *Cahaya di Kegelapan : Capita Selecta Kedua Boedi Oetomo dan Sarekat Islam* (Jakarta : Penerbit Jayasakti 1981)hlm. 165

¹⁷ *Majalah Boedi Oetomo 1928*. Hlm. 25

¹⁸ Gamal Komandoko. *Boedi Oetomo : Awal Bangkitnya Kesadaran Bangsa (Yogyakarta : Penerbit Medpress 2008)* hlm.105

¹⁹ Akira Nagazumi. *Op Cit.*, hlm.164

²⁰ *Ibid.*,

banyak memakan biaya dari pada polisi. Perlu diadakan milisi untuk bumi putra, namun berhubung rapat belum mengetahui dengan jelas bagaimana akan jadinya pelaksanaan itu samapai pada bagian yang terperinci karena mengingat timbulnya berbagai keberatan, menyatakan perlunya menimbang pendapat rakyat tentang hal ini sehingga perlu dibentuk dewan perwakilan rakyat.”²¹

Ketua umum Radjiman meletakkan jabatannya dalam rapat tersebut dan diganti R.M. Ario Suryosuparto. (Mangkunegoro VII).²² R.M. Ario Suryosuparto mengambil alih menangani permasalahan tentang milisi dan pembentukan suatu Dewan Rakyat. Masalah pentingnya perwakilan rakyat dianggap lebih menguat dibanding masalah milisi. Pejabat pemerintah kolonial terpecah menjadi dua, dalam menanggapi usulan dibentuknya Dewan Rakyat. Kaum etis dapat menerima sedangkan kaum konservatif menentang keras. Kaum konserfatif beranggapan diadakannya Dewan Rakyat akan merugikan Belanda. Van Aalst Residen Surabaya beraliran konservatif berkata,” bagi saya pengakuan hak pilih bagi pribumi berarti awal berakhirnya kekuasaan Belanda di Jawa. Pengakuan itu akan mengakibatkan dihapuskannya kekuasaan Belanda secara hukum.”²³

Terbentuknya suatu parlemen di hindia dipandang layak oleh kaum Etis selama partai Moderat seperti Budi Utomo ini akan menguasai badan tersebut. Kaum Etis menegaskan bahwa Budi Utomo memiliki peranan yang sangat penting di dalam dewan perwakilan rakyat ini apabila sudah terbentuk kelak. Karena Budi Utomo bisa menjadi jembatan antara golongan radikal dan golongan konservatif. Hal ini disebabkan karena dalam pandangan politik sayap kiri Budi Utomo menyerupai Sarekat Islam, sedangkan sayap kananya mempunyai pandangan yang serupa dengan pandangan kaum bangsawan. Dapat disimpulkan bahwa Budi Utomo bercorak moderat dan bersikap bersahabat terhadap pemerintah, serta mendukung gagasan kemajuan secara bertahap.²⁴ Hal ini menjadi bukti yang jelas bahwa Budi Utomo yang selama ini dipandang sebagai suatu organisasi sosial sekarang dipandang sebagai organisasi politik. Langkah Budi Utomo semakin dalam memasuki ranah politik. kritikan dari berbagai kalangan ketika menjelaskan tentang

²¹ Slamet Muljana. *Kesadaran Nasional : Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan* (Yogyakarta : PT. Lukis Pelangi Aksara 2008)hlm. 49

²² *Majalah Boedi Oetomo 1928*. Hlm.25

²³ Gamal Komandoko. *Boedi Oetomo : Awal Bangkitnya Kesadaran Bangsa* (Yogyakarta : Penerbit Medpress 2008) hlm.112

²⁴ *Ibid.*,

pentingnya milisi, berbuah pujian ketika memperjuangkan berdirinya sebuah perwakilan rakyat. Gunawan Mangunkusumo menyampaikan pujiannya. Menurut Gunawan perjuangan untuk pembentukan *Volksraad* akhirnya membawa Budi Utomo memasuki kancah perjuangan baru.²⁵

Keinginan rakyat pribumi sesungguhnya agar segera terbentuknya perundang-undangan yang menjamin terbentuknya parlemen sendiri. Gubernur Jendral van Limburg Stirum sangat memperhatikan masalah ini, dan sangat besar dukungannya. Sejak bulan Juli Ia terus menerus mendesak agar undang-undang itu segera disahkan. Akhirnya undang-undang itu diterima Statuten General pada tanggal 11 Desember 1916.²⁶ Semula dewan tersebut akan dinamakan dewan kolonial namun dikhawatirkan bahwa sebutan dewan kolonial akan menimbulkan pertentangan dari penduduk pribumi, maka badan baru ini dinamakan *Volksraad*. *Volksraad* didirikan sebagai badan penasehat untuk pemerintah Hindia Belanda, bukanlah dimaksudkan sebagai parlemen dengan tanggung jawab membuat undang-undang negara. Menurut menteri urusan jajahan *Volksraad* merupakan benih tumbuhnya sistem parlemen di Hindia. Menteri urusan jajahan juga menyebutkan masalah milisi bagi penduduk pribumi merupakan masalah yang harus dipertimbangkan dalam *Volksraad* jika badan ini sudah mulai bekerja.

Menurut ketentuan undang-undang, *Volksraad* terdiri atas anggota anggota sebagai berikut:

1. Ketua diangkat oleh Ratu
2. Sembilan belas anggota dipilih oleh anggota dewan daerah dan dewan kota; diantara mereka sepuluh orang adalah pribumi dan sembilan adalah Eropa
3. Sembilan belas juga dipilih oleh gubernur jendral atas nasihat dewan Hindia Belanda; dari sembilan belas ini lima adalah pribumi, dan empat belas adalah Eropa.²⁷

Dengan demikian parlemen baru ini terdiri dari 38 anggota dan 1 ketua. Badan ini berwenang membahas masalah masalah anggaran Hindia Belanda, tetapi tidak memiliki kekuasaan legislatif atau eksekutif. Keberhasilan Budi Utomo yang ikut berperan dalam terbentuknya *Volksraad*, merupakan prestasi yang luar biasa bagi organisasi tersebut. Budi Utomo merasa pengaruhnya semakin kuat di Hindia Belanda.

Keberhasilan Dwidjosewojo di Belanda merupakan jawaban atas kritik yang gencar menerpanya ketika ia menjelaskan pentingnya milisi. Menurutnya keberhasilan terwujudnya *Volksraad* terdapat pada keseimbangan hak (rakyat berparlemen) dan kewajiban (milisi). Pemerintah

²⁵ Gamal Komandoko. *Boedi Oetomo : Awal Bangkitnya Kesadaran Bangsa*(Yogyakarta : Penerbit Medpress 2008) hlm. 114

²⁶ *Ibid.*,hlm. 118

²⁷ Akira Nagazumi. *Op Cit.*, hlm. 189

tentu akan menuruti rakyat jika rakyat juga menunjukkan kesanggupannya dalam melakukan milisi.²⁸

Kabar pengesahan pendirian *Volksraad* telah didengar di Hindia Belanda meski utusan komite pertahanan Hindia masih berada di Belanda. Budi Utomo segera mengambil prakarsa membentuk komite nasional yang beranggotakan pimpinan berbagai organisasi pribumi dengan maksud membahas *Volksraad* dan mempersiapkan diri untuk pemilihannya pada masa datang.

Organisasi yang terlibat dalam komite nasional diantaranya: Budi Utomo dengan dua utusan, empat organisasi daerah kerajaan dengan enam utusan, perhimpunan bupati mengirim dua utusan, Central Sarekat Islam satu utusan dan Perserikatan Guru-Guru Hindia Belanda (PGHB) mengirim dua utusan. Dari semua organisasi hanya PGHB sajalah yang tidak termasuk di dalam delegasi ke Negeri Belanda.²⁹ Anggota komite Nasional terdiri dari:

Sidang pertama komite nasional diselenggarakan pada tanggal 31 Maret 1917 di Batavia. Wakil-wakil yang ditunjuk sebagai ketua dan sekretaris keuangan masing-masing adalah R.M.A. Woerjanngrat dan Sastrowidjono dari Budi Utomo. Anggota organisasi lainnya yang condong bersifat Jawa sentris berada dibawah naungan Budi Utomo dan bertindak sebagai penyelenggara. Kecuali CSI yang terancam pecah oleh masalah pertahanan Hindia duduk di dalam komite tetapi tidak memiliki hasrat untuk mendukung program-program komite secara aktif.

Pembentukan *Volksraad* membuat orang-orang Belanda yang ada di Hindia juga tidak mau ketinggalan untuk memperoleh tempat di dalam *Volksraad*. Orang-orang Belanda yang ada di Hindia serentak membentuk partai-partai politik. Kelompok kepentingan yang lebih konserfatif di kalangan pejabat Belanda di dalam pemerintah diwakili oleh VABB, organisasi ini sudah terbentuk sejak tahun 1911. Golongan etis baik yang berada di dalam maupun di luar pejabat Belanda membentuk NIVB atau perhimpunan Liberal Hindia Belanda pada tahun 1916. Partai ini diorganisasikan secara longgar menjadi suatu perhimpunan dengan keanggotaan terbuka bagi beberapa lapisan penduduk pribumi. Golongan kristen juga membentuk partai sendiri, kaum protestan membentuk CEP pada bulan September 1917, disusul golongan katolik Hindia mendirikan IKP pada bulan November 1918.³⁰

Minat terhadap kenggotan *Volksraad* mulai tumbuh dikalangan masyarakat. Gubernur Jendral van Limburg Stirum menghendaki anggota-anggota *Volksraad* nantinya adalah orang-orang yang benar-benar mencerminkan sebanyak-banyaknya

unsur yang terdapat di Hindia. Ia berharap kepentingan Hindia Belanda dapat terwakili dalam Dewan Rakyat. Menurutny tidak perlu golongan priyayi diberi wakil terlalu banyak, karena pengaruh mereka yang sudah cukup kuat. Jawa hendaknya tidak terlalu banyak diwakili sehingga mengorbankan daerah-daerah lain. Gubernur Jendral van Linburg Stirum juga mengharapkan agar golongan muda jawa dan elemen-elemen maju mendapat tempat sebaik-baiknya. Gubernur Jendral akan mencoba membuat daftar sendiri dengan harapan agar elemen-elemen yang maju mendapatkan perlakuan yang lebih adil. Hal itu dilakukan agar *Volksraad* nantinya tidak dianggap sebagai boneka pemerintah Belanda.³¹ Gubernur Jendral van Limburg Stirum memberitahukan menteri Jajahan Pleitje mengenai hasil pemungutan suara Pada tanggal 21 Januari 1918. Anggota-anggota pribumi yang terpilih adalah:

1. Abdoel Moeis (CSI)
2. M. Aboekasan Atmodirono (Budi Utomo)
3. R. Kamil (Budi Utomo)
4. Radjiman Wedyodiningrat (Budi Utomo)
5. R.Sastrowidjono (Budi Utomo)
6. Abdul Rivai (Insulinde)
7. R.A.A.A. Djajadiningrat (Perhimpunan Bupati dan NIVB)
8. R.A.A. Koesoemo Joedo (Perhimpunan Bupati)
9. R.M.A.A. Koesoemo Oetojo (Perhimpunan Bupati)
10. A.L. Waworoentoe (Orang Manado)³²

Anggota-anggota yang terpilih dalam *volksraad* sebagian besar diisi oleh kaum priyayi. Agar keseimbangan bisa dicapai diantara berbagai kelompok etnis, politis dan keagamaan dikalangan penduduk pribumi, Van Limburg stirum menggunakan kekuasaannya selaku Gubernur Jendral untuk mengangkat 5 anggota pribumi. Van Limburg Stirum juga tidak ragu mengangkat beberapa tokoh radikal sebagai anggota *Volksraad*.³³ Anggota-anggota pribumi yang dipilih Gubernur Van Limberg Stirum diantaranya :

1. Tjipto Mangoenkusumo (Insulinde)
2. Tjokroaminoto (CSI)
3. Dwidjosewojo (Budi Utomo)
4. P.A.A.P Prangwadono (Srimangkunegara VI)
5. Teuku Tji Mohamad Thajeb (Daerah Peureula Aceh)³⁴

Pada umumnya kaum moderatlah yang memenuhi kualifikasi untuk dipilih sebagai anggota *Volksraad*, oleh karena itu tidak mengherankan

³¹ *Ibid.*,

³² Gamal komandoko. *Op Cit.* hlm. 124

³³ Sartono Kartodirdjo. *Pengantar*

Sejarah Indonesia Baru : Sejarah Pergerakan Nasional (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1990) hlm.130

³⁴ Gamal komandoko. *Op Cit.*, hlm. 124

²⁸ Gamal komandoko. *Op Cit.* hlm. 118

²⁹ Akira Nagazumi. *Op Cit.*, hlm.200

³⁰ Akira Nagazumi. *Op Cit.*, hlm. 202

apabila *Volsraad* memiliki mayoritas anggota yang terdiri dari kaum moderat.³⁵ *Volsraad* secara resmi dibuka pada tanggal 18 Mei 1918 oleh Gubernur Jendral van Limburg Stirum. J.C. Konongsberger terpilih sebagai ketua *Volsraad* pertama. Dalam pidatonya ia mengatakan bahwa *Volsraad* mudah-mudahan cukup memuaskan walau belum sempurna di mata kebanyakan penduduk pribumi. Suasana umum yang terasa pada waktu itu mendukung bahwa pembukaan *Volsraad* merupakan pertanda bagi permulaan zaman baru. Tanda-tanda menggembirakan tampak di depan perjalanan perwakilan ini pada masa depan.

Sidang pertama *Volsraad* diselenggarakan pada tanggal 27 juni 1918,³⁶ wakil-wakil Budi Utomo dalam sidang lebih banyak membicarakan masalah pendidikan. Khususnya Radjiman yang menegaskan arti politik didalam pendidikan bagi rakyat pribumi. Ia menyatakan kekecewaannya, bahwa pembangunan masyarakat pribumi masih jauh dari memuaskan. Radjiman mengemukakan perlunya pendidikan untuk meletakkan dasar-dasar pembangunan masyarakat. Dalam pidatonya di depan *Volsraad* ia menekankan pentingnya penduduk Hindia diajarkan sejarah tentang pribumi agar mereka mengerti arti penting demokrasi. Dwidjosewojo juga mengemukakan tentang sistem pendidikan di Jawa yang kurang memuaskan karena belum bisa dinikmati oleh seluruh penduduk pribumi. Sastrowidjono dan wakil yang berhaluan radikal baik pribumi dan eropa menyesali keadaan bahwa *Volsraad* tidak memiliki kekuasaan legislatif. Wakil-wakil Budi Utomo sebenarnya merasa sangat kecewa sama halnya dengan elemen-elemen lain yang merasa tidak puas, namun Budi Utomo merasa tidak perlu mengungkapkan kekecewaan tersebut secara berlebihan.

Berakhirnya Perang Dunia 1 pada tahun 1918, mengakibatkan timbulnya krisis politik di Negeri Belanda. Dampak krisis politik ini juga meluas sampai ke Hindia Belanda. Krisis politik di Belanda dipicu pemberontakan yang dilakukan oleh SDAP atau Partai Buruh Demokrasi di Belanda yang berusaha merebut kekuasaan pemerintah Belanda. Di Hindia Belanda yang paling dekat dengan SDAP adalah ISDP (*Indische Social Demokratische Partij*). C.G. Cramer selaku wakil ISDP menyampaikan mosi, menurutnya perlu terbentuknya suatu front persatuan antara elemen-elemen demokratis pribumi dan Eropa di Hindia Belanda. Para anggota *Volsraad* sangat terkejut dengan pemberontakan di Negeri Belanda sama halnya dengan pemerintah kolonial. Partai-partai yang lebih radikal dalam *Volsraad* seperti CSI dan Insulinde yang keterikatannya dengan pemerintah sangat sedikit memiliki fleksibilitas lebih tinggi

dan akan seang hati bergabung kedalam front persatuan.

Budi Utomo dalam posisi yang tidak mudah timbul kebimbangan karena kedekatan hubungan Budi Utomo dengan pemerintah. Wakil-wakil Budi Utomo terus berfikir, akhirnya memutuskan tidak ada salahnya mendukung tuntutan pembaharuan dengan turut bergabung dalam front persatuan melihat tidak adanya kepastian tentang politik dalam pemerintah. C.G. Cramer akhirnya memprakarsai terbentuknya *Radikal Concentratie* atau front persatuan sebagai usaha untuk mempersatukan aliran-aliran kiri di dalam *Volsraad*. *Radikal Concentratie* terdiri dari Budi Utomo, CSI dan Insulinde.³⁷ Budi Utomo dalam politik di dalam *Volsraad* sudah cukup jelas menunjukkan warna dan corak alirannya karena bersedia duduk dalam *Radicale Concentratie* dengan demikian Budi Utomo menunjukkan sifat progresif dalam memihak kepentingan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat (*Volsraad*) sejatinya adalah orang-orang yang mewakili rakyat dan dipilih oleh rakyat serta Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya memiliki hak legislatif bukan hanya sebagai penasehat pemerintah. Keinginan itulah yang ingin diwujudkan melalui *Radicale Concentratie*.³⁸ Gubernur Jendral Van Limburg membenarkan rencana pembaharuan di Hindia Belanda dan mulai menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan pembaharuan di dalam *Volsraad*.

Gubernur Jendral Van Limburg mulai mengadakan acara seperti dengar pendapat dengan anggota *Radicale Concentratie*. Gubernur Jendral kemudian mengeluarkan maklumat pemerintah tanggal 17 Desember 1918 dengan membentuk *Herzienings-Commissie* atau komisi Reform beranggotakan 28 orang dengan dua orang anggota dari Budi Utomo yaitu Koesoemo Oetoyo dan Radjiman.³⁹ Tindakan Gubernur Jendral tersebut menimbulkan kritikan yang sangat tajam dari para ahli kolonial konservatif di Belanda. Menteri urusan tanah Jajahan Idenburg juga merasa kecewa dengan langkah yang diambil Gubernur Jendral Van Limburg. Gubernur Jendral mengabaikan seluruh kritikan yang dilontarkan kepadanya, dan tetap berunding tentang rencana pembaharuan sistem di dalam *Volsraad*. Berbagai usulan dikemukakan diantaranya, meminta agar *Volsraad* diubah

³⁷ Susanto Tirtoprodjo. *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia* (Jakarta : Penerbit P.T. Pembangunan, 1993) hlm. 18

³⁸ Slamet Muljana. *Kesadaran Nasional : Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan* (Yogyakarta : PT. Lukis Pelangi Aksara 2008) hlm. 56

³⁹ Akira Nagazumi. *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia : Budi Utomo 1908 – 1918*. (Jakarta : Pustaka Umum, 1989) hlm. 244

³⁵ Sartono Kartodirdjo. *Op Cit.*, hlm. 131

³⁶ *Ibid.*, hlm. 238

sehingga menjadi sebuah badan legislatif dan ditambahkan anggota-anggota pribumi di dalamnya.

Murling seorang wakil pemerintahan pada *Volksraad* mengomentari rekomendasi penambahan anggota pribumi, menurutnya penambahan wakil-wakil pribumi di dalam *Volksraad* tidak harus diartikan sebagai penambahan berimbang pada jumlah anggota kaum terpelajar pribumi, namun ia menyimpulkan bahwa Budi Utomo yang bisa memberikan wakil-wakil yang berbobot untuk *Volksraad*.⁴⁰ Peran Budi Utomo di dalam *Radical Concentratie* ternyata tidak merusak reputasinya yang lunak di hadapan pemerintah. Budi Utomo tidak melepas keinginannya agar tetap mendapat sambutan baik dari pemerintah. Timbulnya kesadaran bahwa keberhasilan kegiatan politik bergantung pada sejauh mana dukungan massa yang diperoleh. Maka Budi Utomo berancang-ancang untuk menambah jumlah anggotanya.

Kartosoehardjo menyampaikan mosi untuk peningkatan program penenerimaan keanggotaan Budi Utomo dikemukakan dalam rapat cabang Budi Utomo di Klaten Jawa Tengah 1 Januari 1919. Alasan yang dikemukakan perlunya Budi Utomo untuk meningkatkan anggota dengan masa yang lebih luas mencakup penduduk pribumi dari kalangan bukan priyayi, untuk menolak kritik bahwa Budi Utomo hanya memperhatikan kepentingan para ningrat atau bangsawan Jawa saja. Seruan mencari dukungan masa ini didukung dengan semakin menurunnya popularitas CSI.⁴¹

Pada tanggal 13 November 1919 menteri urusan tanah jajahan Idenburg memundurkan diri dan digantikan oleh Simon De Graff yang lebih Pada bulan Maret 1921 masa jabatan Gubernur Jendral Van Limburg berakhir dan ia digantikan oleh D. Fock, salah seorang yang paling keras kecamannya terhadap kebijakan Van Limburg Stirum. Suasana kebebasan di Hindia menjadi terbatas setelah berakhirnya masa pemerintahan Van Limburg Stirum.⁴² Rencana untuk menjadikan *Volksraad* sebagai sebuah lembaga legislatif akhirnya gagal. Sepeninggal Van Limburg *Volksraad* hanya tetap menjadi badan penasihat pemerintah kolonial. Hal ini disebabkan karena menteri urusan tanah jajahan yang baru Simon De Graff dan Gubernur Jendral yang baru D.Fok beraliran konservatif dan sangat menentang kebijakan-kebijakan Van Limburg stirum.

Budi Utomo lebih meningkatkan lagi pekerjaannya dibidang politik dengan ikut serta menjadi anggota Permufakatan Perhimpunan-

perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPKI) pada tahun 1927. PPKI didirikan pada bulan Desember 1927 atas inisiatif Sukarno. PPKI di dalamnya terdiri dari Sarekat Islam, Budi Utomo, Pasundan, Perkumpulan kaum betawi, *Indonische Studie Club Surabaya* dan *Sumatranen Bond*. Semua partai-partai ini mulai Desember 1927 bersama-sama menggabungkan diri menjadi PPKI.

Budi Utomo mengadakan perubahan anggaran dasar mengenai keanggotaan dalam kongres tahun 1931. Budi Utomo terbuka untuk semua bangsa Indonesia tidak terbatas lagi pada Jawa dan Madura. Budi Utomo terbuka untuk semua orang tidak memandang asalanya dari mana, ini menunjukkan evolusi dari Budi Utomo yang semula kedaerahan Jawa dan Madura meningkat kepada persatuan bangsa Indonesia. Cita-cita Cipto Mangunkusumo untuk mengubah dasar keanggotaan Budi Utomo pada September 1909 yang ditolak pengurus besar Budi Utomo baru terealisasi setelah 22 tahun kemudian.⁴³

Kongres Budi Utomo yang diselenggarakan pada tahun 1931, menghasilkan keputusan penting lain, ialah kongres memerintahkan kepada pengurus besar untuk berusaha mempersatukan perkumpulan-perkumpulan yang berdasarkan kebangsaan Indonesia. Usaha pengurus besar itu berhasil pada bulan Januari 1931 dibentuk komisi bersama antara Budi Utomo dan PBI, yang kemudian disetujui oleh kedua pengurus besarnya, maka dalam bulan Desember 1935 telah terjadi fusi antara Budi Utomo dengan PBI yang berkedudukan di Surabaya dan dipimpin oleh Sutomo. Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) berfusi menjadi satu perkumpulan yang dinamakan Partai Indonesia Raya (PARINDRA).

KESIMPULAN

Munculnya Organisasi baru yang lebih revolusioner seperti Sarekat Islam dan Indische Partij membuat kedudukan Budi Utomo terdesak. Lambatnya perkembangan Budi Utomo mengakibatkan keluarnya banyak anggota dari organisasi Budi Utomo. Anggota yang keluar merasa visi misi Budi Utomo sudah tidak sejalan dengan perkembangan zaman. Anggota-anggota Budi Utomo yang keluar akhirnya memilih untuk bergabung dengan Sarekat Islam atau Indische Partij. Mulai timbul kesadaran dari petinggi Budi Utomo untuk mengubah orientasinya ke ranah politik, namun masih terjadi pertentangan di dalamnya.

Kadaan pada masa itu memaksa Budi Utomo harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pecahnya perang Dunia 1 pada tahun 1915 memunculkan isu tentang pentingnya milisi atau

⁴⁰ Akira Nagazumi. *Op Cit.*, hlm245

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 246

⁴² Gamal Komandoko. *Boedi Oetomo :*

Awal Bangkitnya Kesadaran Bangsa(Yogyakarta : Penerbit Medpress 2008) hlm. 132

⁴³ Slamet Muljana. *Op Cit.*, hlm. 67

wajib militer bagi penduduk pribumi. Menanggapi keadaan tersebut mau tidak mau Budi Utomo harus terlibat dalam masalah milisi karena menyangkut kepentingan rakyat dan pemerintah kolonial. Budi Utomo dibawah kepemimpinan Radjiman akhirnya mendukung tentang pentingnya milisi untuk mempertahankan Hindia Belanda dari serangan negara asing. Masalah milisi merupakan masalah politik, dan Budi Utomo untuk pertama kalinya terjun dalam masalah politik.

Terpilihnya Van Linburg Stirum sebagai Gubernur Jendral yang baru turut mempermudah langkah Budi Utomo untuk masuk ke ranah politik. Van Linburg Stirum sejalan dengan Budi Utomo yang menginginkan pembaharuan terhadap Hindia secara bertahap. Langkah Budi Utomo selanjutnya adalah mengupayakan terbentuknya sebuah dewan rakyat atau *volksraad*. Budi Utomo juga terlibat dalam usaha pendirian suatu fraksi golongan kiri di dalam *Volksraad* yang dinamakan *Radical Concentratie*. C. G. Kramer anggota dari perkumpulan ISDV memprakarsai terbentuknya *Radical Concentratie* pada bulan November 1918. *Radical Concentratie* ini terdiri dari organisasi ISDV, Budi Utomo, Sarekat Islam, dan NIP. Pada kongres Budi Utomo 1921 di adakan tuntutan supaya dalam *Volksraad* itu diadakan *Inlandsche Meerderheia*, yaitu : agar golongan terbesar dalam *Volksraad* terdiri dari golongan pribumi.

SARAN

Sebagai generasi penerus kita dapat mengambil pelajaran dari perjalanan organisasi Budi Utomo yang semula berorientasi sosial ekonomi kemudian menuju politik. Untuk menyampaikan aspirasi terhadap pemerintah, tidak cukup hanya mengandalkan sebuah organisasi sosial. Perlu kendaraan yang lebih besar yaitu organisasi politik. Budi Utomo dalam usaha memperbarui *Hindia* secara bertahap (memprakarsai terbentuknya suatu Dewan Rakyat untuk mengusahakan tercapainya sebuah kemerdekaan) menggunakan sarana organisasi politik.

Untuk penelitian yang akan datang, diharapkan peneliti berikutnya mampu menguasai bahasa Belanda dengan baik, karena banyaknya sumber arsip maupun surat kabar yang berbahasa Belanda. Untuk penelitian yang akan datang diharapkan pula lebih menspesifikkan penelitian tentang Budi Utomo kearah cabang-cabang Budi Utomo, misalnya Budi Utomo cabang Jakarta atau lainnya.

DAFTAR PUSTAKA :**SUMBER ARSIP :**

Arsip Statutan Boedi Oetomo tanggal 20 Mei 1908.

Anggaran Rumah Tangga Budi Utomo.

Laporan Rapat Umum Luar Biasa dari Boedi Oetomo yang diadakan di Jogjakarta pada tanggal 4-5 November 1922

SURAT KABAR :

Surat kabar Boedi Oetomo, nomor 129-130 tanggal 25-26 Oktober tahun 1922 Jogjakarta.

Surat kabar Boedi Oetomo tahun 1928

SUMBER SEKUNDER :

Abdurachman Surjomoharjo. *Budi Utomo Cabang Betawi*. Jakarta : Penerbit Pustaka Jaya.

Akira Nagazumi.1989. *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia : Budi Utomo 1908-1918*. Jakarta : Pustaka Umum.

Aminuddin Kasdi. 2006. *Metode Penulisan Sejarah*. Surabaya: Universitas IKIP Surabaya.

Bambang Sulistyoy.1995. *Pemogokan Buruh : Sebuah Kajian Sejarah* . Yogyakarta : Penerbit PT. Tiara Wacana.

Darsjaf Rachman. *kilas petikan Budi Utomo*. (Jakarta : Penerbit Yayasan Idayu 1975)

Edi Cahyono. 2003. *Jaman Bergerak di Hindia-Belanda : Mosaik bacaan kaum pergerakan tempo dulu*. Jakarta : Penerbit Yayasan Pancur Siwah.

Gamal Komandoko.2008. *Boedi Oetomo : Awal Bangkitnya Kesadaran Bangsa*. Yogyakarta : Penerbit Medpress.

G. Mudjiyanto. *Indonesia Abad ke-20 : Dari Kebangkitan Nasional Sampai Linggajati*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.

J.S. Furnivall. 2009. *Hindia-Belanda : Studi tentang Ekonomi Majemuk*. . Jakarta : Penerbit Freedom Institute.

Marwati Djoened Poesponegoro.1975. *Sejarah Nasional Indonesia V*. Jakarta : Penerbit Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Nyoman Dekker. *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia : Diawali Kebangkitan Nasional Pada Permulaan Abad XX*. Malang : Penerbit Ikip Malang.

Pitut Soeharto dan A. Zainoel Ihsan. *Cahaya Di Kegelapan : Capita Selecta Kedua Boedi Oetomo dan Sarekat Islam*. Jakarta : Penerbit Jayasakti.

Pringgodigdo. 1980. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia* .Jakarta : Penerbit Dian Rakyat.

Sartono Kartodirdjo. 1990. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru : Sejarah Pergerakan Nasional* .Jakarta : Penerbit Erlangga.

Slamet Muljana. 2008. *Kesadaran Nasional : Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan*. Yogyakarta : PT. Lukis Pelangi Aksara.

Suhartono. 1994. *Sejarah Pergerakan Nasional : dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar.

Suhartoyo. 1987. *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia : Suatu Analisa Ilmiah* .Yogyakarta:Penerbit Liberty.

Susanto Tirtoprodjo. 1993. *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia* . Jakarta : Penerbit P.T. Pembangunan.

I.